

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PEMERINTAH (WILAYAH PROVINSI DI PULAU JAWA)

Rizky Novananda Fauzan Hasibuan, Dul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the factor that influence the level of transparency of local government through empirical testing, particularly financial reports is the most important part that must be submitted by the Regional Government since regional autonomy was implemented by the Central Government. This study was conducted in 6 provinces on the island of Java in 2013-2018. Sampling is done using the purposive sampling method Hypothesis testing used significance test and multiple linear regression analysis. The data collection method is obtained the local government website. The results of hypothesis testing in this study indicate that the presentation of regional financial reports has a significant positive effect on the use of regional financial information by information users.

Keywords Financial report, Transparency and Significance, Financial information

PENDAHULUAN

Transparansi adalah masalah utama dalam pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan informasi lebih banyak tentang anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan sejumlah gangguan. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat untuk mengelola dana dari masyarakat, sehingga keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana sangat tergantung pada lembaga pemerintah daerah yang mengimplementasikannya (Adisasmita, 2011). Pengelolaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas didefinisikan sebagai respons pemerintah terhadap publik tentang tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010).

Di Indonesia, laporan keuangan daerah yang disiapkan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen keuangan. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01.9 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor kepada sumber daya yang dapat dipercayakannya. Disisi lain sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah / PP) Nomor 56/2005 didalam Republik Indonesia (2005,b) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dukungan dari sistem informasi keuangan daerah adalah diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal nasional dah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dalam Pasal 13 (b), peraturan pemerintah menyatakan bahwa informasi keuangan daerah harus disajikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tercantum dalam Republik Indonesia (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik dikeluarkan untuk mengatur kewajiban badan publik manapun untuk mempublikasikan informasi publik secara terbuka. Badan publik dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah.

E-government adalah pemanfaatan aplikasi teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengkomunikasikan berbagai hal kepada berbagai pihak,

¹ Corresponding author

baik masyarakat, investor, kreditor, atau pihak-pihak yang terkait dengan informasi pemerintah terkait (Wijayanto, 2009). Situs web adalah sarana untuk mendukung penyampaian informasi yang efisien kepada masyarakat luas dan mempengaruhi aspek komunikatif pelaporan keuangan (Hiola & Rosidi, 2015).

Di Indonesia, informasi melalui situs web pemerintah daerah diungkapkan dengan berbagai cara yang dijelaskan oleh Afryansyah dan Haryanto (2013), yaitu beberapa pemerintah mengungkapkan informasi secara penuh dan sebagian, sedang atau minimal. Pemerintah daerah terikat oleh peraturan pemerintah yang terkait dengannya yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi publik dengan cara yang mudah diakses oleh publik dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Medina, 2012). Dalam hal ini, terdapat tingkat kenyamanan yang tinggi bagi masyarakat karena pengguna dapat menemukan dan melihat keuangan dan informasi non-keuangan di situs web pemerintah daerah (Styles & Tennyson, 2007). Karena itu, dibutuhkan sumber daya keuangan (aset) dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan infrastruktur di bidang teknologi informasi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Jensen & Meckling, (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk mengerjakan beberapa layanan atas nama mereka, termasuk mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut teori agensi, hubungan *principal* dan agen harus menggunakan informasi dalam organisasi secara efisien untuk meminimalkan asimetri informasi dan biaya berbasis risiko (Eisenhardt, 1989). Pengungkapan sukarela adalah kebijaksanaan manajer (Verrechia, 1983), manajer akan mengungkapkan informasi sukarela ketika manfaat lebih besar daripada biaya terkait.

Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Afryansyah dan Haryanto, (2013), jumlah total aset pemerintah daerah berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah. Medina, (2012) ukuran pemerintah daerah yang tercermin dalam total aset pemerintah daerah berbanding lurus dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan di situs web resmi pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Medina, (2012), juga terbukti secara empiris dalam penelitian Trisnawati dan Achmad, (2014), ukuran pemerintah daerah melalui total asetnya mempengaruhi publikasi laporan keuangan melalui internet.

Sebaliknya, Setyaningrum dan Syafitri, (2012) menggunakan ukuran pemerintah daerah melalui proksi total aset dan menyatakan bahwa tidak ada pengaruh aset terhadap pengungkapan wajib LKPD di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan Dewi et al., (2015), yang menyatakan bahwa aset pemerintah provinsi tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan informasi keuangan daerah.

Laswad et al., Groof dan Pitman, (2004), Styles dan Tennyson, (2007) menyatakan bahwa ketersediaan laporan keuangan di internet menunjukkan dokumen laporan keuangan yang tersedia secara *online*. Dalam kerangka teori agensi, ketersediaan informasi anggaran pemerintah daerah menunjukkan upaya untuk mengurangi masalah asimetri informasi.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah memiliki efek positif terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah disiapkan dan siap untuk dipublikasikan kepada publik, perlu untuk melakukan proses audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga audit keuangan. Styles dan Tennyson, (2007) dan Pina et al., (2010) memberikan bukti empiris bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan penghargaan dari organisasi eksternal untuk praktik pelaporan keuangan yang baik, sehingga cenderung lebih menyajikan laporan keuangan mereka di internet. Bertentangan dengan penelitian oleh Styles dan Tennyson, (2007) penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad, (2014)

menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki efek positif terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tingkat Respon Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Akuntansi Keuangan, ada dua teori yang dapat menggambarkan latar belakang dari perubahan dalam standar akuntansi pemerintah ini, yaitu perspektif pasar bebas dan perspektif pro-regulasi (Deegan dan Unerman, 2006). Berkaitan dengan teori institusional adalah bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungannya (Wahyuni dan Adam, 2016).

Penerapan SAP berbasis akrual adalah persyaratan yang harus diterapkan oleh semua pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64/2013 (Republik Indonesia, 2013) yang memberikan konsekuensi untuk perubahan dalam pelaporan LKPD yang ditunjukkan untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusat. Studi Wahyuni dan Adam, (2016) memberikan bukti empiris bahwa implementasi SAP berbasis akrual di Kota Malang lebih diarahkan pada paksaan aturan yang ada dalam organisasi.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat Respon Pemerintah Daerah terhadap peraturan memiliki efek negatif terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Lingkungan Politik Pemerintah Daerah

Garcia dan Garcia, (2010) berpendapat bahwa lawan politik akan dengan cepat menginformasikan setiap penyimpangan dalam tindakan partai yang berkuasa yang tidak konsisten dengan janji yang dibuat selama pemilihan. Semakin kompetitif lingkungan politik, semakin banyak insentif yang akan dikeluarkan untuk berkomunikasi dengan publik (legitimasi) kinerja tata kelola yang baik melalui pengungkapan informasi keuangan di situs web (Perez et al., 2008 dalam Dewi et al., 2015).

Ratman et al., (2013) menunjukkan bahwa persaingan politik yang lebih tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan mereka di internet. Laswad et al., (2005), Sinaga, (2011) dan Afryansyah dan Haryanto, (2013) menyatakan bahwa persaingan politik tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi secara sukarela melalui internet. Studi Trisnawati dan Achmad, (2014) memberikan bukti empiris bahwa persaingan politik mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan melalui situs web.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Lingkungan Politik di Pemerintah Daerah secara positif mempengaruhi Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek yang memiliki nilai yang bakal digunakan di dalam riset untuk dipelajari hingga mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Variabel memiliki beberapa fungsi, di dalam riset ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen serta variabel independent. Didalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen serta variabel independent. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan transparansi pemerintah. Sedangkan variabel independent yang digunakan di dalam penelitian ini ada ukuran pemerintah daerah (*asset*), kualitas pelaporan pemerintah daerah (*opinion*), tingkat respon pemerintah daerah (*accrual*), dan lingkungan politik pemerintah daerah (*public*).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (provinsi) di pulau Jawa selama periode 2013-2018 pada masing-masing website pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah (provinsi) di Indonesia. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan yaitu untuk menguji dan menganalisis transparansi pemerintah di daerah.

Teknik *purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Metode Analisis

$$TransPD = \beta_0 + \beta_1 Asset + \beta_2 AOpinion + \beta_3 Accrual + \beta_4 Politics$$

Keterangan:

TransPD = Transparansi Pemerintah

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variable independen

Asset = Total aset pemerintah daerah

Opinion = Kualitas pelaporan pemerintah daerah

Accrual = Tingkat respon pemerintah daerah

Politics = Lingkungan politik pemerintah daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperlihatkan persebaran data penelitian. Analisis ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Deviasi Standar
TransPD	0,50	1,00	0,8594	0,14110
ASSET	29,30	33,88	31,2131	1,37287
OPINION	0,00	1,00	0,8438	0,36890
ACCRUAL	0,00	1,00	0,8437	0,36890
POLITIC	0,00	1,00	0,3437	0,48256

Sumber: Data *output* SPSS (2021)

Hasil pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah observasi atau jumlah dari pengamatan pada *website* Pemerintah Daerah di Pulau Jawa sebanyak 6 Provinsi yang diambil pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS ditemukan bahwa rata-rata *TransPD* ditemukan hasil sebesar 0,8594 dimana nilai terendah *TransPD* diangka 0,50 dan nilai tertinggi *TransPD* diangka 1,00.

ASSET memiliki nilai rata-rata sebesar 31,2131, ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan nilai terendah yaitu sebesar 29,30 dan nilai tertinggi sebesar 33,88.

OPINION memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8438, ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 1,00.

ACCRUAL memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8437, ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 1,00.

POLITIC memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3437, ini menunjukkan bahwa sampel penelitian memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 1,00.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan. Hasil pengujian model regresi disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien β	Nilai t	Signifikan
ASSET (H1)	0,038	2,270	0,031
OPINION (H2)	0,055	0,848	0,404
ACCRUAL (H3)	0,047	0,802	0,429
POLITIC (H4)	0,157	3,894	0,001
Adjusted R2	0,359		
F	5,332		
Sig. F	0,003		

Sumber Data *output* SPSS (2021)

Pengujian hipotesis pertama digunakan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah pada perusahaan manufaktur di Indonesia diuji melalui pengujian hipotesis pertama. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,031 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,038 sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran pemerintah daerah dan transparansi pemerintah. Artinya semakin besar total aset didalam pelaporan keuangan setiap provinsi daerah akan semakin tinggi juga tingkat transparansi pemerintah yang akan dihasilkan.

Hasil ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Medina, (2012) dan Trisnawati dan Achmad, (2014). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang tercermin dalam total aset pemerintah daerah akan berbanding lurus dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan disitus web resmi milik pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji kualitas laporan keuangan daerah dan transparansi pemerintah di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,404 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,010 dan koefisien beta sebesar 0,055 sehingga hipotesis kedua ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif antara kualitas laporan keuangan daerah dan transparansi pemerintah di Indonesia dimana hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara kualitas laporan keuangan daerah dan transparansi pemerintah di Indonesia.

Sementara hasil dari uji non-statistik dapat dilihat dari laporan keuangan untuk wilayah Provinsi Banten tahun 2015, Provinsi DKI tahun 2014, 2015, dan tahun 2016, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dari hasil Audit BPK menyatakan Pendapat Tidak Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini diakibatkan dari adanya temuan beberapa transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

Hal itu juga terjadi di Provinsi Banten yang terjadi di tahun 2014 dimana pihak Auditor BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan Auditor BPK membuat pernyataan tidak memberi pendapat (*Disclaimer*).

Hal inilah yang membuat hasil analisis hipotesis ini ditolak, disamping itu kurang harmonisnya hubungan antar eksekutif dengan legislatif yaitu Gubernur dengan Anggota Dewan, dimana DPRD sebagai Lembaga Legislatif.

Hasil dari pengujian hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad, (2014). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Sejalan dengan teori agensi, pemerintah sebagai agen untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam laporan keuangan lokal melalui pemeriksaan auditor atas kewajaran penyajiannya. Hasil audit tersebut akan berbetuk opini audit dimana akan memberikan sejumlah informasi kepada kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis ketiga digunakan untuk menguji tingkat respon pemerintah daerah terhadap peraturan memiliki efek negatif dan transparansi pemerintah. Hasil dari pengujian menunjukan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,429 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,050 dan koefisien beta sebesar 0,047 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif antara tingkat respon pemerintah daerah dan transparansi pemerintah daerah.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara tingkat respon pemerintah daerah dan transparansi pemerintah daerah. Artinya, semakin besar tingkat respon pemerintah daerah menandakan semakin tingginya transparansi pemerintah yang akan dihasilkan.

Hasil ini konsisten dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2013 (Republik Indonesia, 2013) pada ketentuan Pasal 10 ayat (2), Transisi Pasal 2 (2) bahwa implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah paling lambat tahun 2015.

Pengujian hipotesis keempat digunakan untuk menguji lingkungan politik di pemerintahan daerah secara positif dan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil dari pengujian menunjukan tingkat signifikansi atau *p-value* sebesar 0,157 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,050 dan koefisien beta sebesar 0,001 sehingga hipotesis keempat diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara lingkungan politik dan transparansi pemerintah daerah.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan politik dan transparansi pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi lingkungan politik di pemerintah daerah menandakan semakin tingginya transparansi pemerintah daerah yang dihasilkan.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumnya oleh Trisnawati dan Achmad, (2014). Penelitian tersebut menyatakan bahwa persaingan politik mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan melalui situs web.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mencari tingkat Transparansi di Indonesia selama 6 tahun dari 2013-2018. Sampel yang didapatkan berjumlah 32 dari 6 provinsi yang telah diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Lingkungan Politik di Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pemerintah Daerah. Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Respon Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan 32 dari 36 sampel, dimana hanya diperoleh dari 6 Provinsi yang hanya terdapat di pulau Jawa. Sejumlah *website* pemerintah daerah jarang mengupdate data terbarunya. Ada data yang tidak dapat dibuka sehingga diperlukan pencarian sumber data dari *website* selain dari Pemerintah Daerah.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afryansyah, R. D. dan Haryanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting*, 2 (3), 1-11.

- Deegan, C. M., Rankin, M. dan Voght, P. (2000). Firms disclosure reaction to major social incidents: Australian evidence. *Accounting Forum*, 24 (1), 101-130.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*.
- Garcia, A. G and Garcia, J. G. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 24 (2), 271-283.
- Groof, J. E. dan Pitman, M. K. (2004). Municipal financial reporting on the world wide web. *Journal of Government Financial Management*, 53 (2), 20-30.
- Hiola, Y. and Rosidi, A. D. M. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Di Website Dengan Opini Audit dan Lingkungan Politik Sebagai Pemoderasi. *Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten Di Sulawesi*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Laswad, F., Fisher, R. and Oylere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 (2), 9-10.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Pina, V., Torres., L. and Royo, S. (2010). Is e-government promoting converge towards more accountable local government? *International Public Management Journal*, 13(4), 350-380.
- Republik Indonesia. (2005b). Undang-Undang Nomor 56, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Setyaningrum, D. and Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (2), 154-170.
- Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah.
- Styles, A and Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US Municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Trisnawati, M. D dan Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi 17, Mataram*.
- Wahyuni, N. E. dan Adam, H. (2016). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Perspektif Teori Intitusalional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang.